

Buletin **BAPPEDA**

Provinsi Papua

**Nakhoda Baru
Bappeda Provinsi Papua**

**Finalisasi Renja SKPD
Tahun 2020**

**Pembahasan URD
Otsus Tahun 2019**

**#edisi 1
.2019**





Buletin **BAPPEDA** Provinsi Papua

Pengantar Redaksi

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, sang Pencipta yang Maha Tau, yang telah melimpahkan kasih-Nya sehingga kami berhasil menyusun Buletin Bappeda Provinsi Papua dengan baik dan lancar.

Buletin ini dibuat demi publikasi data dan informasi mengenai kinerja bappeda provinsi papua. Masyarakat luas mendapatkan wawasan tambahan mengenai perencanaan pembangunan daerah atau pembangunan di papua yang menjadikan data sebagai bahan acuan/dasar arah kebijakan.

Di edisi ini, kami akan memulai secara bertahap menghadirkan informasi akurat tentang Bappeda Provinsi Papua dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah yaitu RPJMD Provinsi Papua yang berbasis pada visi misi gub dan wagub Papua dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 serta beberapa aktifitas rutin Bappeda seperti memfasilitasi penyusunan Renstra, pembahasan Renja SKPD 2020, Pembahasan URD Otsus 80% bagian kab/kota dan pertemuan forum data.

Harapan kami tidak ada kekurangan sama sekali dalam penyusunan redaksi buletin ini, akan tetapi kami menyadari bahwa pengetahuan kami sangatlah terbatas, sehingga kami tetap mengharapkan masukan serta kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk buletin ini.

Semoga Tuhan memberkati dan merahmati kita semua, red.

Daftar Isi

1	NAKHODA Baru Bappeda Provinsi Papua
2-3	Kick Off Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
4	Tindak Lanjut Pendampingan Finalisasi Renstra
5	Pendampingan Finalisasi Renstra dan Penyusunan Renja Tahun 2020
6	Pembahasan Renja SKPD Tahun 2020
7	Finalisasi Renja SKPD Tahun 2020
8-9	Pertemuan Forum Data Dengan Tema "Satu Data Indonesia"
10-13	Galeri Bappeda
14	Pertemuan Finalisasi RKPD
15	Pembahasan URD Otsus Tahun 2019

Redaksi

Penanggung Jawab
Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si

Pimpinan Redaksi
Adolof Kambuaya, SH. M.Si

Dewan Redaksi
Andry, SIP, M.Si
Yulien Weya, SH., M.AP
DR. Fredy Molle, SE, MM
DR. Jhon J. Boekorsjom, S.Sos, M.Si
Edison Howay, SH, M.Hum
Verra A.P Wanda, ST, M.Si
Ngadiman, SE

Redaktur Pelaksana
Merlin Hamadi, SE, M.Si
Syafrudin Mukhtar
Ir. Iriawan, MBA, MM
Donny O. A. Renmaur, S.STP

Peliputan Berita
Yusran
Mikha Bukorpioper
Aprilia Natalia Bonay
Nur Aisa, S.IP
Yunus Samsudin Irianto Mara

Editor
Freddy Taribaba
Zeth F. Waroy, SE
Muhammad Harrys Usman, S.Kom
Novi Agaki, S.S

Layout & Desain Buletin
Yanu Misdianto, S.Kom
Indra Rukmana, S.Kom

Administrasi
Yune Natalia Yonathan, SE
Ayu Indriyani, S.Km
Yuliana, Amd. Keb

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH saat mengambil sumpah/janji dan melantik pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua di Gedung Negara, Selasa 20 Oktober 2019.



NAKHODA BARU BAPPEDA PROVINSI PAPUA

Bertempat di Gedung Negara Jayapura Papua pada tanggal 20 Agustus 2019, Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP., MH melantik secara resmi Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Bappeda Provinsi Papua menggantikan DR. Drs. Muhammad Musaad, M.Si.

Dalam sambutannya Gubernur Papua menyampaikan bahwa peran perencanaan sangat penting dalam pembangunan karena itu perencanaan harus dibuat dengan baik. Perencanaan sangat penting karena bila perencanaan salah maka pelaksanaannya pun akan salah. Perencanaan juga harus mengacu pada regulasi sehingga Gubernur diperiode berikutnya dipermudah dalam penyelenggaraan pemerintahannya, lanjut Gubernur.

Tentu bukan alasan pilih, ketika Gubernur Lukas Enembe menempatkan Yohanes Walilo sebagai Pimpinan Perencanaan di Provinsi Papua. Segudang pengalaman tentu menjadi modal bagi seorang pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua yang harus membawahi

Bappeda-Bappeda di 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Sebelumnya Yohanes Walilo menjabat sebagai Sekretaris Daerah Jayawijaya.

Bappeda Provinsi Papua dibawah kepemimpinan Bapak Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si yang didukung oleh para pejabat eselon III dan selon IV dan seluruh staf Bappeda Provinsi Papua dipercaya akan mampu menjalankan tugas yang diemban, dengan menjabarkan Visi dan Misi Gubernur Papua khususnya dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Papua. Salah satunya adalah perencanaan yang berbasis data. Satu Data Indonesia, terdengar sederhana tetapi yang tersirat dari itu adalah bagaimana Bappeda dalam hal ini Bappeda Provinsi Papua wajib menghadirkan data-data terukur valid dan terkini yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua. Ini adalah satu dari sekian Tupoksi Bappeda yang harus dijalankan.

Selamat Bertugas Bapak Kepala ...

Kick Off Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD

RPJMD adalah sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 5 tahun (2019-2023) yang berisikan tentang visi misi, perencanaan, strategi maupun pencapaian Kepala Daerah terpilih, juga memuat kebijakan maupun capaian yang menitikberatkan kepada sumber daya manusia, perekonomian, pembangunan infrastruktur maupun juga kesehatan secara menyeluruh yang bersifat transparan, aktif, dan memberikan pemahaman serta langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Kepala Daerah harus mampu menjabarkan secara detail yang dituangkan didalam dokumen RPJMD, agar pembangunan (infrastruktur dan sumber daya manusia) dapat direalisasikan dan tepat sasaran. Penyusunan RPJMD Provinsi Papua yang perlu diselaraskan dengan RPJMN sehingga apa yang tertuang dalam RPJMD juga sejalan dengan tetapan RPJMN

Proses kegiatan orientasi penyusunan RPJMD dilaksanakan pada tanggal 6 september

2018 di hotel Aston, dibuka oleh Sekretaris Daerah Papua T.E.A. Hery Dosinean, S.IP., M.KP., M.Si dan dihadiri oleh Pejabat Tinggi Pemda Provinsi Papua. Pada pernyataannya beliau menyampaikan "penyusunan RPJMD harus terintegritas dengan RPJMN dan tak membias hanya karena kepentingan-kepentingan yang bisa menghambat pelaksanaan pemerintah pusat serta integrasi juga harus terjadi pada pemerintah kab/kota dan provinsi sehingga terarah, visi dan misi gubernur bisa terwujud yaitu papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan.

Penyampaian aspirasi, pendapat, data maupun pengalaman dilapangan menjadi salah satuan acuan atau tolak ukur dalam penyusunan RPJMD ini. Keterlibatan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, maupun juga aktivis yang mendukung pembangunan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Papua berperan aktif. Bappeda Provinsi Papua memfasilitasi para pendukung pembangunan ini dalam pertemuan konsultasi publik yang dilaksanakan



pada tanggal 2 november 2018 di Timika dan Merauke. Dihadiri oleh seluruh instansi pemerintah, tokoh masyarakat dan aktivis/mitra pembangunan yang tersebar di 5 wilayah adat. Adanya konsultasi publik ini bertujuan menampung segala aspirasi serta mendapatkan mengevaluasi program dan kegiatan yang didasari oleh RPJMD sebelumnya.

Tidak hanya sampai konsultasi publik, bappeda juga menyelenggarakan Musrenbang RPJMD yang dilaksanakan pada 6 desember

2019 di hotel aston jayapura dan dihadiri oleh instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten kota. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan tujuan dan sasaran rpjmd maupun strategi dan program pembangunan daerah dalam rancangan RPJMD.

Rangkaian proses rancangan RPJMD berlanjut pada fase pelaporan rancangan RPJMD Provinsi Papua pada kegiatan yang berlangsung pada tanggal 22 Maret 2019 di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta sebagai tindak lanjut permintaan Kemendagri terkait evaluasi dan konsultasi RPJMD Provinsi Papua.(*)



Sekretaris Daerah T.E.A. Hery Dosinean, S.IP., M.KP., M.Si memberikan sambutannya pada kegiatan Orientasi Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023 di Hotel Aston.



Bapak Dr. Muhammad Musaad, M.Si bersama tim dari Kementerian dalam rangka mengevaluasi laporan Akhir RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023 di Jakarta.



Dr. Muhammad Musaad, M.Si memimpin Forum Konsultasi Publik bersama SKPD terkait, Mitra Pembangunan dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Mimika.



Sekretaris Bappeda didampingi Kepala Pusat Data Bappeda memberikan arahan sebelum dilanjutkannya kegiatan pendampingan finalisasi renstra bersama SKPD.

Tindak Lanjut Pendampingan Finalisasi Renstra

DALAM rangka penyusunan dokumen rencana strategi (RENSTRA) SKPD, maka Bappeda secara intens mendampingi ke 52 SKPD terkait finalisasi renstra berdasarkan tugas dan fungsi SKPD, prioritas dan kegiatan, visi dan misi gubernur. Diawali dengan evaluasi terhadap SKPD yang belum dan telah menyelesaikan finalisasi RENSTRA. Diketahui masih banyak SKPD belum menyelesaikan RENSTRA.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sekretaris Bappeda, Adolof Kambuaya, SH, M.Si, penginputan renstra ke dalam aplikasi serta berdiskusi bersama tim pokja bisa terlaksana apabila sudah masuk pada tahap finalisasi renstra. Pelatihan penginputan aplikasi e-ppr (Papua Pu Rencana) akan dilaksanakan oleh Bappeda.

Tujuan kegiatan ini mengetahui sejauh mana

tahap dalam progress penyusunan RENSTRA, serta menghasilkan matriks lengkap terdiri dari tujuan, isu permasalahan, tujuan sasaran, strategi sampai dengan program dan indikator kinerja, yang mana bisa diperoleh output yakni rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Terkait dengan isu peleburan SKPD tidak boleh mempengaruhi proses penyusunan renstra, karena urusan setiap SKPD tetap ada, hal ini disampaikan oleh Kepala pusat Data Bappeda.

Pengumpulan dokumen draft renstra paling lambat di tanggal 25 Januari ke Bappeda, selain itu tim bappeda akan memastikan kesesuaian draft-draft tersebut hingga tercetusnya surat keputusan Gubernur sehingga penetapan RENSTRA bisa segera ditetapkan. (*)



Kepala Pusat Data Bappeda memberikan arahan kepada SKPD dalam pertemuan pendampingan finalisasi renstra dan penyusunan renja tahun 2020.

Pendampingan Finalisasi Renstra dan Penyusunan Renja Tahun 2020

DALAM rangka finalisasi Rencana Strategi dan Penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2020, Bappeda menyelenggarakan kegiatan pendampingan kepada SKPD selama 2 (dua) hari ; Senin-Selasa tanggal 1-2 April 2019 di Ruang Rapat lantai I Bappeda Provinsi Papua yang dihadiri oleh seluruh SKPD terkait, pada pukul 10.00 WIT. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang dapat tepat sasaran.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Bappeda Adolof Kambuaya, SH.,M.Si yang dihadiri oleh seluruh SKPD. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa dalam merancang Rencana Strategi SKPD perlu disusun program rencana kerja untuk tahun 2020 karena akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Bappeda dalam hal ini akan terus mendampingi sampai tahap finalisasi kemudian diinput ke dalam sistem e-PPR (Papua Pu Rencana). Kegiatan ini dipandu oleh Tim Ahli dan Para Kepala Bidang di Bappeda Provinsi Papua. Tentu saja, ada pemaparan materi mengenai renja terlebih dahulu oleh

Kepala Pusdalisbang, Andry, SIP.M.Si. materi yang disampaikan terdiri dari Konsistensi dan Integrasi Penyusunan Renja SKPD, Integrasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Keterkaitan Tahap Penyusunan RKPd dan Renja SKPD, dll.

Rencana strategi SKPD merupakan dokumen perencanaan tentang kebijakan, program, Visi dan Misi maupun tujuan terkait pembangunan. Selanjutnya Rencana kerja SKPD juga merupakan dokumen perencanaan SKPD terkait kebijakan, kegiatan, program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tentunya yang juga bisa melibatkan partisipasi masyarakat untuk periode 1 (satu) tahun. Renstra pun disusun berdasarkan fungsi dan tugas satuan kerja perangkat daerah (skpd)

Dengan pendampingan kegiatan ini diharapkan SKPD mampu menyusun RENSTRA dan RENJA secara baik dan benar selama masa pemerintahan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tina, kegiatan dan program bisa terarah sesuai dengan Visi Dan Misi pembangunan, serta membawa dampak yang signifikan bagi pembangunan Papua yang bangkit, mandiri dan sejahtera. (*)



Suasana pembahasan Renja SKPD yang didampingi oleh Tim dari Bappeda Provinsi Papua.

Pembahasan Renja SKPD Tahun 2020

SAMPAI pada pembahasan rencana kerja tahun 2020, bappeda kembali memfasilitasi SKPD untuk menentukan usulan program dan kegiatan selama satu tahun. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari yakni pada hari rabu dan kamis pada tanggal 23-24 mei 2019 di ruang rapat lantai 1 (satu) bappeda provinsi papua.

Kegiatan ini didampingi oleh tim pembahas dan LO. Program dan kegiatan skpd telah diinput di aplikasi e-ppr (papua pu rencana) sehingga mempermudah pembahasan daripada menggunakan lembaran demi lembaran. Pembahasan dibagi menjadi beberapa meja selama dua hari kegiatan berlangsung.

Usulan-usulan yang terdapat pada Rencana kerja tersebut harus berdasarkan persetujuan kepala dinas dan verifikasi dari para kepala bidang bappeda. SKPD dapat langsung

menyampaikan usulan sesuai dengan urusan/ tugas dan fungsi instansinya kepada tim pembahas sesuai bidang-bidang yang terkait.

Secara sederhana mekanisme pembahasan renja tersebut, adalah menampilkan renja yang telah terinput ke dalam aplikasi e-ppr (papua pu rencana), kemudian SKPD dan Tim Pembahas dari Bidang terkait membahas rencana/kegiatan satu persatu.

Dalam pembahasan situasi yang ditemukan adalah suasana berdebat. Tim pembahas tetap bertugas meluruskan pembahasan yang barangkali keluar dari jalur yang seharusnya, sehingga SKPD bisa mendapatkan pemahaman yang baik terkait usulan mereka sehingga bisa menghasilkan rencana kerja yang tepat sasaran berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, leih tepatnya sesuai dan sejalan dengan Dokumen RPJMD.(*)

Finalisasi Renja SKPD Tahun 2020

RENCANA Kerja SKPD sudah melalui tahapan finalisasi dengan dilaksanakannya pertemuan finalisasi rencana kerja SKPD yang diselenggarakan pada ruang rapat Bappeda lantai 1, hari jumat 13 september 2019 pukul 09.00 WIT. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Papua yaitu Bapak Yohanes Walilo., S.Sos., M.Si, beliau menyampaikan agar SKPD segera menyelesaikan penyusunan perubahan 2019 yang sedang berjalan. Sehingga penyusunan perubahan APBD induk 2020 juga bisa cepat dilaksanakan bersama anggota DPRD yang lama agar tidak terjadi keterlambatan, mengingat pelantikan DPRD seluruh indonesia akan segera dilaksanakan pada 30 oktober 2019 mendatang.

Beliau juga menghimbau agar penyusunan Renstra disusun berbasis visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode kedua ini, seperti halnya RPJMD yang telah sinkron dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Pertemuan tersebut juga terdapat beberapa usulan baru, maka beliau mengarahkan agar usulan tersebut dibahas pada bidang masing-masing terlebih dahulu sebelum diserahkan ke kepala pusat data. Ada juga arahan dari Gubernur yang mengharuskan dimasa kepemimpinannya pada periode kedua ini, program dan kegiatan yang besar dapat diketahui oleh masyarakat di Papua karena terkait pembangunan infrastruktur untuk kepentingan orang banyak dalam jangka waktu yang lama dan akan diresmikan secara simbolis oleh Gubernur Papua sendiri. Tugas dan tanggung jawab bersama semua SKPD yaitu menerjemahkan usulan/ arahan sudah berjalan

namun pada prosesnya terjadi kesalahan teknis maka tugas SKPD untuk menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan dengan memberikan alasan yang jelas.

Dalam waktu 1 tahun kedepan agenda nasional yaitu PON 2020 akan segera terlaksana, maka harus ditinjau kembali namun kegiatan untuk PON dan kegiatan rutin SKPD akan tetap berjalan. Beliau juga menambahkan bahwa himbuan dari gubernur untuk seluruh kepala SKPD Provinsi Papua untuk lebih pro aktif atau jemput bola terkait dana yang ada di kementerian/ lembaga dengan cara membuat proposal terkait program/ kegiatan di provinsi dan tidak berharap hanya pada pendapatan daerah seperti DAU, dana Otsus, DAK maupun dana hibah.

Kepala Pusdalibang-Bappeda Provinsi Papua Andry., SIP., M.Si menyampaikan beberapa SKPD yang belum mengumpulkan dokumen Renstra. Beliau juga menghimbau agar semua SKPD yang ada kegiatan mendukung PON harus ada dalam daftar kegiatan Renstra dalam mengantisipasi audit dikemudian hari, terlebih kegiatan dengan kebutuhan anggaran yang besar.

Maka dari pertemuan Finalisasi Renja tersebut dapat disimpulkan dalam beberapa poin penting seperti memperbaiki Renja sesuai dengan catatan pembahasan Renja, menyesuaikan sumber dana, mengisi dan melengkapi indikator mulai dari 2017 sampai dengan 2019 dan batas pengumpulan Renja yaitu pada tanggal 18 september 2019.(*)



Kepala Bappeda Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si membuka pertemuan Finalisasi Renja SKPD.



Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Muhammad Musaad, M.Si membuka acara Forum Data Provinsi Papua.



Pertemuan Forum Data oleh Pusdalbang dan didukung Mitra Pembangunan (WRI) dengan tema Satu Data Indonesia Provinsi Papua.

Pertemuan Forum Data Dengan Tema “Satu Data Indonesia”

PUSAT data menyelenggarakan pertemuan forum data senin (14 /8/2019) pada pukul 09.00 WIT di ruang rapat lantai 1 Bappeda Provinsi Papua, kegiatan ini mengusung tema yakni Satu Data Indonesia yang didukung oleh World Resources Institute (WRI) merupakan salah satu mitra pembangunan papua yang bergerak pada bidang sosial. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Muhammad Musaad, M.Si, Kepala Bidang Data, Kepala BPS dan seluruh wali data SKPD dan instansi vertikal.

Pertemuan ini dibuka oleh Dr. Muhammad Musaad, M.Si, beliau menyampaikan beberapa poin penting terkait data dan orang asli papua. ujarnya bahwa keakuratan data yang sangat penting, tanpa data yang akurat. program dan kegiatan pemerintah tidak tepat sasaran dan akan membias. Persoalan terkait data juga sering menjadi benturan keras dalam ruang lingkup pemerintahan, pasalnya, data statis adalah data yang paling sering ditemukan dan belum kunjung ada penyelesaian, batas antara provinsi papua

dan papua barat belum juga tuntas diakibatkan terburu-burunya pembentukan pemekaran kabupaten-kabupaten baru yang tidak diawali dengan menentukan batas –batas wilayah.

OAP (Orang asli papua) juga tetap menjadi sorotan tajam untuk Pemerintah Provinsi Papua. beliau juga menyampaikan hal penting terkait jumlah orang asli papua. agar menjadi komitmen bersama dan mengingat ada beberapa kebijakan yang mengkhususkan orang asli papua sehingga semuanya tepat sasaran dan diharapkan juga data orang asli papua lengkap dan valid.

Upaya forum data “Papua Satu Data” dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua lebih baik, tepat sasaran dan implikasinya lebih kepada kepentingan masyarakat Papua.

Adapun poin penting yang disampaikan oleh plt. Asisten II selaku kepala bappeda Dr. Muhammad Musaad, M.Si yaitu Pusat Data Bappeda merupakan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan produktivitas informasi data Papua menjadi lebih baik dan bekerjasama

dengan WRI, UNCEN dan Pemprov bersama-sama menyusun agenda kedepan dan akan segera dibuatkan SK Gubernur dan diberikan intensif untuk wali data.

Kepala Pusdalbang Bappeda Provinsi Papua menyampaikan forum data sudah intens sejak 2017, wali data seluruh SKPD dan Instansi Vertikal telah ada elemen data yang wajib diinput kedalam aplikasi, melaporkan ketersediaan data masing-masing SKPD serta menjelaskan fungsi forum data dan membuat rencana kerja kedepan melalui kesepakatan bersama.

Adapun tanggapan dari Kepala BPS Drs. Simon Sapary, M.Sc menambahkan bahwa saat ini data masih bermacam-macam, berdasarkan instruksi presiden menuju satu data tahun 2020 maka bulan mei akan dilakukan sensus penduduk karena masih banyak penduduk papua yang belum terdata dalam kependudukan dengan harapan Gubernur Papua bahwa ada data valid tentang jumlah penduduk Papua.

Perwakilan dari WRI Indonesia yaitu Dewi Tresya, menjelaskan bahwa paparan dasar perpres mengatur lebih banyak tata kelola kelembagaan dengan tujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan. Prinsip-prinsip satu data Indonesia, yaitu : Standar data, Harus memiliki meta data, Kaid interoperabilitas data,

serta adanya kode referensi atau data induk yang menjadi dasar dari data. Adapun Sistem kelembagaan ditingkat pusat ada 4 elemen penting seperti Dewan mengarah yang berfungsi memberikan arahan diketuai oleh Kepala Bappenas/ menteri perencanaan pembangunan dengan anggotanya, Pembina data, Wali data tingkat pusat dan Produsen data.

Usulan yang disampaikan Ibu Dewi Tresya diantaranya adalah Forum data yang sudah ada dapat dinaikan menjadi forum data SDI tingkat Papua, Membentuk peraturan Gubernur yang isinya adalah bagaimana tata kelola Satu Data Indonesia tingkat papua, dan Papua sudah lebih maju dan sudah memiliki forum data untuk bisa memulai atau menyusun daftar data yang disepakati yang akan dikumpulkan ditahun 2020.

Bapak Prihananto dari UNCEN menyampaikan bahwa kebijakan satu data Indonesia bukannya hanya punya satu data, melainkan diolah sampai nanti akhirnya dipublikasikan sehingga bisa dipakai bersama-sama. Sesuai dengan perpres 59 tahun 2007 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan, dimana pembangunan ini akan memikirkan generasi sekarang dan generasi yang akan datang untuk memperoleh hak yang sama, baik menyangkut sumber daya alam, ataupun sumber daya yang lain di Provinsi Papua.(*)

• Galeri Bappeda



1
Penyepakatan Jadwal Penyusunan RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 Bersama Mitra Kerja Pembangunan, 30 Agustus 2018.



2
Pemaparan Proses Penyusunan Bersama Mitra Kerja Pembangunan, 31 Agustus 2018.



3
Pertemuan Tim Penyusun RPJMD, 19 September 2018.



4
Orientasi Penyusunan RPJMD, 20 September 2018.



5
Pertemuan Tim POKJA RPJMD, 21 September 2018.



6
Penyusunan Ranwal RPJMD Oleh Tim POKJA (Pokja Ekonomi), --September 2018



7
Penyusunan Ranwal RPJMD Oleh Tim POKJA (Pokja Infrastruktur & Konektivitas) --September 2018.



8
Penyusunan Ranwal RPJMD Oleh Tim POKJA (Pokja Percepatan Pembangunan Daerah) --September 2018.



9
Penyusunan Ranwal RPJMD Oleh Tim POKJA (Pokja Sumber Daya Manusia) --September 2018.



10
Penyusunan Ranwal RPJMD Oleh Tim POKJA (Pokja Pemerintahan & Umum) --September 2018.



11
Pleno Tim Pokja, 10 Oktober 2018.



12
Ranwal RPJMD dan Penyusunan RENSTRA SKPD, 19 Oktober 2018.



13
Pembahasan Ranwal RPJMD, 24 Oktober 2018.

• Galeri Bappeda



14

Pembahasan Ranwal RPJMD dan Persiapan Paparan Konsultasi Publik, 28 Oktober 2018.



15

Konsultasi Publik (Merauke), 02 November 2018.



16

Konsultasi Publik (Timika), 02 November 2018.



17

Integrasi KLHS Dalam RPJMD, 07 November 2018.



18

Pelatihan Analisis Kemiskinan Menggunakan Aplikasi SEPAKAT Bappenas sebagai bahan penyusunan RPJMD, 08 November 2018.



19

Diskusi Bersama tim penyusun RPJMD dengan tim KLHS tentang Integrasi KLHS Dalam RPJMD, 08 November 2018.



20

Penyusunan RPJMD Melalui SIPD (e-Planning dan e-Database) & SPM dalam RPJMD dan Renstra SKPD Provinsi, 09 November 2018.



21

MUSRENBANG RPJMD Tahun 2018-2023_POKJA 1 (SDM), 06 Desember 2018.



22

MUSRENBANG RPJMD Tahun 2018-2023_POKJA 2 (Pemerintahan & Umum), 06 Desember 2018.



23

MUSRENBANG RPJMD Tahun 2018-2023_POKJA 3 (Ekonomi), 06 Desember 2018.



24

MUSRENBANG RPJMD Tahun 2018-2023_POKJA 4 (Infrastruktur & Konektivitas), 06 Desember 2018.



25

MUSRENBANG RPJMD Tahun 2018-2023_POKJA 5 (Percepatan Pembangunan Daerah), 06 Desember 2018.



26

MUSRENBANG RPJMD Tahun 2018-2023_Foto Bersama & Penutupan, 06 Desember 2018.



27

Pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2020, 30 Oktober 2019.



28

Pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2020, 31 Oktober 2019.



Kegiatan Finalisasi Target Pendapatan dan Pagu Indikatif RKPD Tahun 2020 bersama Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Muhammad Musaad, M.Si dengan Pejabat Eselon 3 dan 4 sekaligus mengundang SKPD terkait.

Pertemuan Finalisasi RKPD

MENANGGAPI hasil fasilitasi rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD Tahun 2020 dari Kementerian Dalam Negeri Ditjen Pembangunan Daerah, Pemerintah Provinsi Papua khususnya Bappeda mengadakan Rapat bersama kepala bappeda, pejabat eselon 3 dan 4 pada hari Kamis, 25 Juli 2019 berlokasi di ruang rapat kepala bappeda lantai 2. Pertemuan tersebut terkait pembahasan finalisasi target pendapatan dan pagu indikatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Mengingat hasil pertemuan yang telah dilaksanakan dalam rapat finalisasi di Jakarta bersama kemendagri, menyampaikan hasil yang harus diperhatikan. Terdapat 192 program dalam rancangan akhir RKPD tahun 2020 karena RPJMD provinsi Papua belum ditetapkan. Ada beberapa

hal juga yang perlu diperhatikan yakni sistematika penulisan RKPD yang masih belum sesuai dengan permendagri 86 tahun 2018, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD masih belum sesuai dengan permendagri 87 tahun 2018, dan catatan lain terkait dokumen RKPD.

Berbagai urusan mulai dari pendidikan, perumahan rakyat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pangan, lingkungan hidup, kepemudaan dan olahraga, pertanian dan energi dan sumber daya mineral serta pagu indikatif rkpd masuk dalam pembahasan pada pertemuan tersebut. Kepala bappeda dan pejabat eselon 3 dan 4 menyetujui rekomendasi-rekomendasi pada program dan kegiatan RKPD 2020, selain Program, kegiatan terkait DAK. (*)



Kepala Sub Bidang Otsus,
Jull Eddy Way, S.Sos

Pembahasan URD Otsus Tahun 2019

PEMBAHASAN URD Otsus 2019 dilaksanakan pada tanggal 23-24 September 2019, bertempat di lantai I Ruang rapat bappeda provinsi Papua. Acara dibuka oleh Kepala Bappeda Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si. Kabupaten-kabupaten yang menjadi peserta adalah 29 Kabupaten/Kota. Ada 26 kab/kota yang ikut serta dalam pembahasan ini dan 3 kabupaten yang tidak hadir dalam pembahasan ini, antara lain Jayawijaya, Yalimo dan Tolikara. Penyebab ketidakhadiran kabupaten-kabupaten ini dikarenakan stabilitas kondisi yang belum aman semenjak pasca kerusuhan akibat demo anarki sebagian orang di Jayawijaya, sehingga penerbangan tak beroperasi, namun tetap menyusul pembahasan di waktu yang lain.

Kepala Sub Bidang Otsus, Jull Eddy Way, S.Sos menyatakan tanggapannya yakni konsisten dan kewajaran itu dirumuskan dalam tugas bagi asistensi, agar didapati usulan yang sesuai antara perencanaan dan penganggaran bahkan sampai dengan belanjanya dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan adanya evaluasi dan monitoring meja.

Beliau juga menambahkan tentang respon lainnya dengan mengarahkan kabupaten kota sebelum pembahasan urd wajib melakukan dua hal. Pertama asistensi dan kedua konsultasi. Asistensi dilakukan untuk mengganti dan membantu peran, mengendalikan SKPD kab

kota yang akan menerima dana otsus dan diarahkan, yang setelah itu hasilnya langsung dikonsultasikan oleh kepala daerah untuk mendapat pengakuan dan dokumennya diserahkan ke Provinsi. Di Provinsi, kita melakukan dua hal yakni konsistensi dan kewajaran pengukurannya. diharapkan dengan dua hal ini didapatkan usulan yang sesuai antara perencanaan dan penganggaran sampai pada belanja.

Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh tim dalam rangka pembahasan urd otsus ini antara lain konsolidasi pembahas provinsi belum terjalin dengan baik, masih terjadi bantahan bantahan terhadap usulan yang bersifat given dari Provinsi kepada kab/kota. Given adalah arahan program/kegiatan, bahkan anggaran. Provinsi telah mengarahkan program/kegiatan bahkan anggaran, namun pada saat pembahasan provinsi cenderung sering membantah dihadapan teman teman kab/kota.

Harapan kedepan adalah tercipta/terkondisikan kembali konsolidasi terhadap given provinsi, mempertegas ukuran sebagai asisten yang adalah asistensi, konsisten dan kewajaran usulan.

Sebagai informasi bahwa musrembang otsus 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 25-27 November 2020 di Hotel Aston Jayapura. (*)

Buletin BAPPEDA Edisi 1 2019

